

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

OLEH :

**AYU ANDIRA
105720474814**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

OLEH :

**AYU ANDIRA
105720474814**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Manajemen*

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

(Ir. Soekarno)

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya.

(Ali Bin Abi Thalib)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT., skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta, Baharuddin S.Pd dan Budhiati yang telah mendidikku semenjak kecil hingga sampai sekarang ini, serta selalu mengiringi kehidupanku dengan penuh rasa kasih sayang, do'a, dan kekuatan. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan Ayah dan Ibu, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Ayah dan Ibu.
- Saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini. Cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.
- Almamaterku Universitas Muhammadiyah Makassar.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

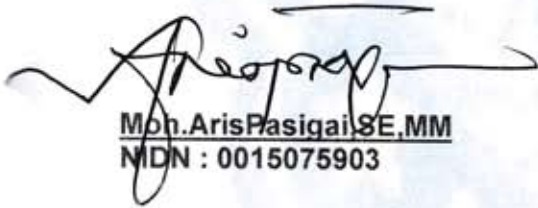
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah
Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang
Nama : Ayu Andira
Nomor Stambuk : 105720474814
Prog.Studi/Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia
Penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

Makassar, 30 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Moh. Aris Pasigai, SE, MM
NIDN : 0015075903

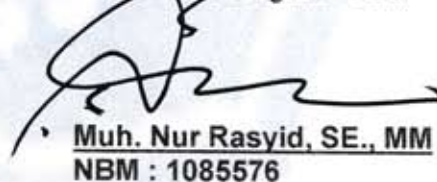
Pembimbing II


Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NIDN : 0905107302

Mengetahui,


Imam Rasulong, SE, MM
NBM : 103075

Ketua Program Studi


Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Ayu Andira**, NIM : **105720474814**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/61201/091004/2018 M, Tanggal 18 Dzulhijjah1439 H / 30 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Mahmud N, MA (.....)
2. Ismail Badollahi, SE, M.Si., Ak.CA (.....)
3. Nasrullah SE (.....)
4. Drs. Asdi, MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE,MM.
NBM : 903078





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Andira
Stambuk : 105720474814
Program Studi : Manajemen
Dengan Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah
Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 7 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :



Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid, SE, MM
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang**” dengan lancar.

Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam proses penyelesaian study.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Bapak M. Hidayat, SE., MM, selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Moh. Aris Pasigai, SE., MM, selaku pembimbing satu dan Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM, selaku pembimbing dua yang senantiasa membimbing, membina, membuka petunjuk kepada penulis dengan

ketulusan hati walaupun sangat banyak masalah yang dihadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan sesuai harapan.

5. Bapak Dr. H. Muh. Rusydi, SE., M.Si, selaku penasehat akademik yang telah mendampingi penulis selama menjalani masa perkuliahan
6. BPKD Kabupaten Enrekang tempat dimana penulis meneliti untuk tugas akhirnya.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Baharuddin S.Pd dan Budhiati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
8. Saudara-saudara penulis yang tercinta, Yusliana S.kep.Ners, Dian Reski Amalia S.pd, Ainun Rahmi dan Muhammad Ilham serta keluarga besar, terimakasih atas do'a, dukungan, nasehat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. *My Boyfriend* Muhammad Ibnu Rusdi, Ayu persembahkan karya kecil ini buatmu. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, kesabaran, pengorbanan, dukungan, motivasi, semangat, senyum dan do'anya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku.
10. Saudari Milnawati Malik (milo) yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat ataupun kawan-kawan seperjuanganku, terkhusus Dewi Marlinda, Muthee, Desty Annisa, Andi Anti, Annisa, Yuyul, Ikha, Dewi Lasari, Siska Woyo, Ikka, Anita, Lisdayadanti.

12. Semua teman-teman kelas Manajemen 3.14 dan keluarga Navigator 014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih tetap semangat dan sukses selalu kawan.

13. Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pembaca di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 07 Agustus 2018

Ayu Andira

ABSTRAK

AYU ANDIRA, 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, (Dibimbing oleh) Bapak Moh.ArisPasigai SE,MM dan Bapak Muh. Nur Rasyid SE,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang periode 2013-2017 menggunakan analisis rasio dan gambaran kinerja keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan SPSS versi 22.

Hasil penelitian yang menggunakan Rasio Likuiditas pada tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2014, mengalami kenaikan yang disebabkan oleh Persediaan dan juga disebabkan karena Utang Jangka Pendek yang sudah terbayarkan meskipun tidak dibayar keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan karena disebabkan oleh Utang Jangka Pendek. Dapat dikatakan bahwa, jika Aktiva Lancar meningkat, maka Kewajiban Jangka Pendek berkurang. Hal ini disebabkan karena Utang Jangka pendek akan dilunasi satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan Aktiva Lancar. Dapat dikatakan bahwa, jika Aktiva Lancar meningkat, maka Kewajiban Jangka Pendek berkurang. Hal ini disebabkan karena Utang Jangka pendek akan dilunasi satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan Aktiva Lancar. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh APBD disusun berdasarkan pertimbangan lokasi anggaran dan defisit, terdapat sanksi dan reward jika pemerintah daerah menyusun APBD yang memenuhi ketentuan alokasi belanja minimal dan defisit maksimal anggaran. Pengelolaan keuangan dipengaruhi dengan penetapan perda APBD dan P-APBD yang memperhatikan jadwal yang diamanatkan, penetapan perda APBD dilihat dari ada tidaknya reward sejumlah anggaran dari pemerintah pusat.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pengelolah Keuangan, Rasio Likuiditas

ABSTRACT

AYU ANDIRA, 2018. Financial Performance Analysis at the Regional Financial Management Agency of Enrekang Regency. Thesis Faculty of Economics and Business Management Department, Muhammadiyah University of Makassar, (Supervised by) Mr. Moh. Aris Pasigai SE, MM and Mr. Muh. Nur Rasyid SE, MM.

This study aims to determine the financial performance of the Enrekang District Financial Management Agency for the 2013-2017 period using ratio analysis and financial performance description to improve the quality of services to the community in Enrekang District.

The research method used is quantitative descriptive. The data obtained is then processed with SPSS version 22.

The results of the study that used the Liquidity Ratio in 2013-2017 in 2014, experienced an increase caused by Inventory and also due to the Short-Term Debt that had been paid even though it was not paid in its entirety. Whereas in 2015-2017 it decreased due to short-term debt. It can be said that, if Current Assets increase, then Short-Term Liabilities are reduced. This is because the short-term debt will be repaid one year using sources that are current assets. It can be said that, if Current Assets increase, then Short-Term Liabilities are reduced. This is because the short-term debt will be repaid one year using sources that are current assets. Financial performance influenced by the APBD is prepared based on consideration of the location of the budget and the deficit, there are sanctions and rewards if the regional government prepares the APBD that meets the minimum expenditure allocation requirements and a maximum budget deficit. Financial management is influenced by the stipulation of APBD and P-APBD regulations which pay attention to the mandated schedule, the stipulation of APBD regional regulations seen from the absence of a number of budgets from the central government.

Keywords : Financial Performance, Financial Management, Liquidity Ratio

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis Kinerja Keuangan	7
1. Pengertian Kinerja	7
2. Pengukuran Kinerja Keuangan	8
3. Penilaian Kinerja Keuangan	8
4. Indikator Kinerja Keuangan	9

B. Analisis Rasio Keuangan	10
1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan.....	10
2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	11
C. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	15
1. Indikator Pengelolaan Keuangan.....	23
D. Tinjauan Empiris.....	24
E. Kerangka Pikir	27
F. Hipotesis.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Definisi Operasional Variabel.....	31
F. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat BPKD.....	35
2. Visi dan Misi BPKD	36
3. Struktur Organisasi	37
4. Tugas dan Tanggung Jawab.....	38
B. Data Khusus.....	39
1. Laporan LRA Tahun 2013-2017.....	39
2. Laporan Neraca Tahun 2013-2017.....	40

C. Uji Hipotesis	50
1. Analisis Regresi Sederhana	50
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinjauan Empiris.....	24
Tabel 4.2	Laporan LRA Tahun 2013-2017	39
Tabel 4.3	Laporan Neraca Tahun 2013-2017.....	40
Tabel 4.4	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	43
Tabel 4.5	Rasio Efektivitas BPKD.....	44
Tabel 4.6	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	46
Tabel 4.7	Rasio Efisiensi BPKD	47
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Regresi	51
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.2 KerangkaFikir.....	27
GaMbar4.1 Struktur Organisasi BPKD.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah diberdayakan dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan serta menggali sumber-sumber berpotensi yang ada di daerah masing-masing. Undang-undang yang menaungi otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia sendiri dapat dilihat dari bentuk nyata penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang berdiri atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dengan menyerahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terjadi di wilayah masing-masing dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu juga terjadi pada pemerintahan Kabupaten Enrekang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mendapatkan tugas dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur jalannya segala urusan pemerintahan dan kepentingan yang ditujukan untuk melayani masyarakat

Kabupaten Enrekang. Selain itu, juga memiliki tugas dimana mereka harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik dan lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan yang akan di pertanggung jawabkan nantinya kepada pemerintahan pusat termasuk juga kepada masyarakat Kabupaten Enrekang sendiri.

Untuk menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya secara menyeluruh, Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (BPKD) menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Seluruh kegiatan pendanaan tersebut perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membantu berdirinya kebijakan pemerintah tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Suplus Defisit Anggaran dan Catatan Atas Laporan keuangan dimana harus ada standar atau acuan yang nantinya bisa dipergunakan untuk melihat kinerja dalam periode tertentu. Dengan adanya standar atau acuan atas kinerja keuangan, otomatis akan ada juga pengukuran kinerja keuangan pemerintahan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut nantinya diharapkan dapat diketahui seberapa mandiri, efektif, efisien dan akuntabel-nya pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bentuk dari penilaian kinerja keuangan yaitu berupa rasio keuangan yang diperoleh dari perhitungan LRA dan

Neraca. Ketika melakukan penilaian, ada indikator kerja terdiri dari 2 tolak ukur penilaian kinerja. Pertama yaitu penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target (anggaran). Kedua adalah efektivitas program, efisiensi belanja dan juga pemerataan dan keadilan. Tolak ukur penilaian kinerja ini digunakan karena nantinya tolak ukur tersebut dapat memperlihatkan seberapa besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik.

Ketika melakukan perhitungan rasio keuangan pada LRA rekening pendapatan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, acuan penilaian yang digunakan adalah jika $X > 100\%$ itu berarti instansi daerah sudah efektif atau efisien dalam menggunakan PAD untuk kelangsungan kegiatan instansi daerah. Apabila $X < 100\%$ maka instansi daerah belum efektif atau efisien dalam menggunakan PAD yang ada. Dan jika $X = 100\%$ maka dikatakan efektif atau efisien yang berimbang. Sedangkan acuan penilaian yang digunakan ketika mengukur tingkat kemandirian keuangan untuk mengetahui pola hubungan antara instansi daerah dengan pemerintah pusat (sebagai pihak luar instansi daerah) adalah jika rasio kemandirian menunjukkan angka 0-25% maka kemandirian keuangannya rendah sekali dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat instruktif (campur tangan pemerintah pusat berperan besar). Kemudian jika rasio kemandirian menunjukkan angka >25-50 kemampuan keuangan dikatakan rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat konsultatif. Untuk rasio kemandirian yang menunjukkan angka >50-75, kemandirian keuangan dikatakan sedang dan memiliki pola hubungan yang bersifat partisipatif. Sedangkan rasio kemandirian dengan angka >75-100

dikatakan memiliki kemampuan keuangan tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif (keterlibatan pemerintah pusat rendah).

Dengan adanya analisis kinerja keuangan dengan menerapkan rasio keuangan di atas, BPKD Kabupaten Enrekang diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas dan efisien untuk memberikan layanan lebih baik untuk masyarakat. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena dengan adanya perhitungan rasio keuangan pada LRA dan Neraca yang memiliki hasil analisa saling terkait bisa membantu pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan dan sasaran program yang selama ini dibebankan pada pemerintah daerah.

Analisis kinerja keuangan dengan perhitungan rasio keuangan ini pun diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan dan merencanakan kinerja di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan di BPKD Kabupaten Enrekang (sebagai bendahara umum) yaitu perencanaan program dan kegiatan yang ada belum menggunakan data yang akurat. Selain itu BPKD (bendahara umum) juga memiliki masalah lain yaitu berupa tuntutan dimana harus bisa meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat maupun instansi lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat masalah tentang penilaian kinerja keuangan pada BPKD Kabupaten Enrekang untuk mengetahui seberapa mandiri, efektif, efisien dan akuntabel-nya. Dengan melakukan penelitian pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, penulis menyusun tugas akhir dengan judul :

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG”. Analisis LRA dan Laporan Neraca pada laporan keuangan BPKD Kabupaten Enrekang menggunakan Rasio Likuiditas,

Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi yang nantinya secara keseluruhan rasio tersebut akan menampilkan kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Likuiditas, Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi menggambarkan kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun Periode 2013-2017?
2. Apakah gambaran kinerja keuangan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan BPKD kepada masyarakat di Kabupaten Enrekang atau kepada instansi lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun Periode 2013-2017 dengan menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi.
2. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan dan kemampuan BPKD untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kabupaten Enrekang atau kepada instansi lain.

D. Manfaat Penelitian

Bagi instansi :

1. Dapat digunakan sebagai acuan penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.
2. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Kabupaten Enrekang.

3. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Kabupaten Enrekang.

Bagi penulis dan pembaca :

- Digunakan sebagai penerapan ilmu dari materi-materi yang meliputi perhitungan rasio keuangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Rudianto (2013) Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Sedangkan menurut Fahmi (2012) Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola perusahaan secara efektif selama periode tertentu dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Karena suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standardan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, pengendalian, dan proses transaksional bagi kalangan perusahaan sekuritas, *fund manager*, eksekutif perusahaan, pemilik, pelaku bursa, kreditur serta *stakeholder* lainnya. Penilaian kinerja perusahaan oleh stakeholder digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap perusahaan. Kepentingan terhadap perusahaan tersebut berkaitan erat dengan harapan kesejahteraan yang mereka peroleh.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang dapat memengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Govindaraja, Nugraha (2010) pengukuran kinerja keuangan perusahaan bertujuan untuk:

- Memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai asset yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan.
- Mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha.

3. Penilaian Kinerja Keuangan

Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan

tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

4. Indikator Kinerja Keuangan

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002). Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Surplus/Defisit APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal dipemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: surplus/defisit = pendapatan daerah-belanja daerah, sedangkan menurut

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: surplus/defisit = (pendapatan-belanja) + silpa + pencairan dana cadangan.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD.

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

4. Analisis Efektivitas (CLR)

Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

B. Analisis Rasio Keuangan

1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Warsidi, Bambang & Fahmi (2011) Analisis Rasio Keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Samryn (2011) Analisis Rasio Keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan

perusahaan menjadi lebih arti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2012), rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut:

- a. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
- b. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
- c. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

Ada pula pengelompokan rasio-rasio menurut (Munawir, 2008) yaitu :

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Leverage (hutang)

Rasio hutang digunakan untuk mengukur seberapa besar operasi perusahaan dibiayai dari hutang.

c. Rasio Aktivitas

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada.

d. Rasio Profitabilitas

Yaitu rasio untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.

e. Rasio Penilaian

Yaitu nisbah untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai perusahaan.

Menurut Harahap (2010), rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
- b. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi.
- c. Rasio rentabilitas/profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar.
- e. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- f. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan persentase kenaikan penjualan/pendapatan tahun ini dibanding dengan tahun lalu.

- g. Penilaian pasar (Market based ratio) adalah rasio yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.
- h. Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.

Sedangkan menurut (Brealey, Myers & Marcus, 2008) ada empat jenis rasio keuangan antara lain:

- a. Rasio Leverage (leverage ratio) memperlihatkan seberapa berat utang perusahaan.
- b. Rasio Likuiditas (liquidity ratio) mengukur seberapa mudah perusahaan dapat memegang kas.
- c. Rasio Efisiensi (efficiency ratio) atau rasio tingkat perputaran (turnover ratio) mengukur seberapa produktif perusahaan menggunakan aset-asetnya.
- d. Rasio profitabilitas (profitability ratio) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan.

Rasio yang dipakai antara lain :

- a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Dimana rasio yang sering digunakan antara lain :

- 1) Rasio Lancar

Rasio lancar menurut Van Horne (2009) adalah Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

2) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Menurut Sugiono (2008), Rasio Kas adalah rasio yang merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan dibandingkan dengan total utang lancar.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2008), Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merialisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk dapat mendukung percepatan birokratisasi dan reformasi pengelolaan keuangan daerah, maka dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah di tingkatan daerah baik Kabupaten maupun Kota. Sehingga terbentuk sinergitas program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fungsi tersebut yang dimaksud adalah:

- 1) Fungsi perencanaan
- 2) Fungsi penganggaran
- 3) Fungsi penatausahaan
- 4) Fungsi pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penatausahaan
- 4) Pelaporan
- 5) Pertanggungjawaban
- 6) Pengawasan

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi:

- 1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Asas umum dan struktur APBD
- 3) Penyusunan rancangan APBD
- 4) Penetapan APBD

- 5) Penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD
- 6) Pelaksanaan APBD
- 7) Perubahan APBD
- 8) Pengelolaan kas
- 9) Penatausahaan keuangan daerah
- 10) Akuntansi keuangan daerah
- 11) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 12) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- 13) Kerugian daerah.
- 14) Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Di dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat 5 (lima) asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Asas umum APBD;
- 3) Asas umum penyusunan APBD;
- 4) Asas umum pelaksanaan APBD;
- 5) Asas umum penatausahaan keuangan daerah.

Kelima asas dalam pengelolaan keuangan daerah ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Asas terintegrasi yang berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Asas tanggung jawab yang berarti keuangan daerah dikelola:
 - a) Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
 - d) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
 - e) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
 - f) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;

- g) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- h) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- i) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- j) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Asas-asas Umum APBD yaitu:

- 1) Asas penganggaran sesuai urusan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD dan penetapan APBD. Asas ini mengandung arti bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, dan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, serta APBD mempunyai:

- a) Fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
 - b) Fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
 - c) Fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d) Fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 - e) Fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - f) Fungsi stabilisasi yang berarti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- 2) Asas penganggaran penerimaan yang terukur secara rasional. Asas ini mengandung arti bahwa penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, serta penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 3) Asas penganggaran pengeluaran secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Asas ini mengandung arti bahwa pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dan belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 4) Asas penganggaran secara bruto, periodik, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, serta APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Asas-asas Umum Penyusunan Rancangan APBD yaitu:

- 1) Asas pendanaan atas beban APBD sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing. Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN; penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi; penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.
- 2) Asas penerimaan dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum. Asas ini mengandung arti bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD; penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran; dan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Asas-asas Umum Pelaksanaan APBD yaitu:

- 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- 5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- 6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- 7) Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- 8) Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- a) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- b) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asas-asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

➤ Indikator Pengelolaan Keuangan

Berikut beberapa indikator pengelolaan keuangan daerah menurut Juwono P Utomo (2009) adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu

Terkait dengan tepat waktu adalah kaitan dengan kalender perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Itupun masih perlu juga memperhatikan jadwal yang diamanatkan dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD yang setiap tahun diterbitkan oleh

Kemendagri, menjadi tugas Bidang Anggaran badan/dinas pengelolaan keuangan daerah untuk mengupayakan hal ini. Indikator ini juga dapat dilihat dari ada tidaknya reward sejumlah anggaran dari pemerintah pusat (Kemenkeu) kepada Kabupaten/kota atas ketepatan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan perda dan perkada APBD/P-APBD.

2. Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja.

3. BPK

Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

D. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1

Tinjauan Empiris

Nama	Judul	Hasil penelitian
Nanda Ertina Gabriella Mailoor, Paul David Elia Saerang, Harijanto Sabijono	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur (Studi Kasus Pada Badan Pengt Daeraraimantan TIR	1. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut analisis Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan nilai Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran menunjukkan

		<p>pertumbuhan positif.</p> <p>2. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Derajat Desentralisi pada Anggaran dan Realisasi Anggaran menunjukkan pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi.</p> <p>3. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.</p> <p>4. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Efektivitas Pendapatan Asli Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang Sangat Efektif.</p> <p>5. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut analisis Pertumbuhan Belanja menunjukkan</p>
--	--	---

		<p>perubahan kinerja keuangan yang wajar.</p> <p>6. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.</p> <p>7. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.</p> <p>8. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.</p>
Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid	Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah	1. Pada tahun anggaran c 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 menunjukkan presentase tingkat ketergantungan yang terus meningkat.
Nur Habibah	Analisis pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah	1. Pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran

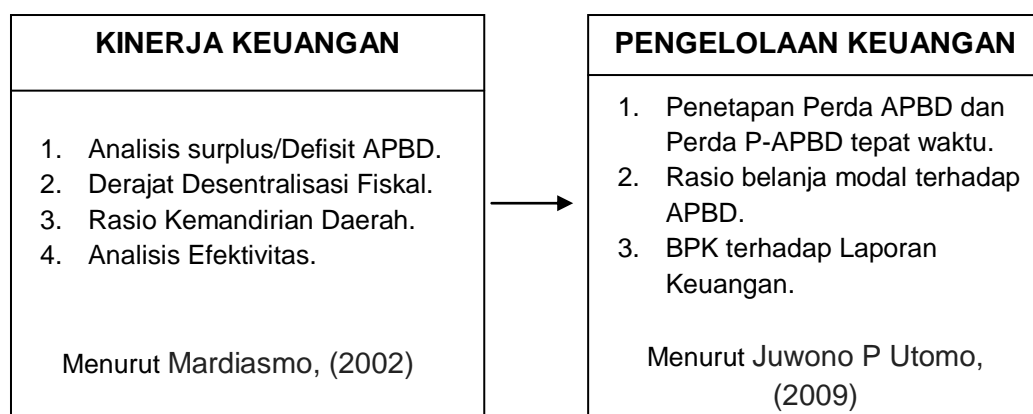
	kabupaten gresik tahun anggaran 2009-2013	2013 menunjukkan presentase tingkat ketergantungan yang terus meningkat.
Muhammad Yogi Perwira	analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten klaten tahun 2007-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. 2. Pajak Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan.

E. Kerangka Pikir

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Gambar 2.2

Kerangka Pikir



F. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu serta kerangka pikir yang telah diuraikan maka hipotesis yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diduga kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun Periode 2013-2017 berpengaruh signifikan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan.
2. Diduga gambaran kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kinerja keuangan daerah Kabupaten Enrekang yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2013-2017 dan disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2013-2017. Lokasi penelitian di Kabupaten Enrekang dan situs penelitian pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan APRIL 2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Enrekang.

2. Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling dimana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel untuk pemerintah, adalah pejabat selaku pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam penyusunan lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.

- Variabel Penelitian

- Identifikasi Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, entah secara positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keterbatasan sistem informasi dan komitmen manajemen.

2) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja.

D. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Laporan realisasi APBD Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017. Instrumen penelitian yaitu ada peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan daerah Kabupaten Enrekang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data kuantitatif.

1. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai kondisi kinerja keuangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang pengembangan sistem tersebut, dalam statistik deskriptif dapat dilakukan dengan mencari kuatnya hubungan antara variabel yang diteliti melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi (Sugiyono, 2010).

E. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

a. Kinerja keuangan (X1)

Kinerja Keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Variabel ini mengungkapkan keterbatasan kemampuan sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliable, dan tepat waktu. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Indikator Kinerja Keuangan yaitu :

- 1) Analisis Surplus/Defisit APBD
- 2) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

3) Rasio Kemandirian Daerah

4) Analisis Efektivitas

2. Variabel Dependen

b. Badan Pengelolaan Keuangan (Y)

Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Variabel ini mengungkapkan tingkat akuntabilitas kinerja yang dirasakan oleh para manajer suatu organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Indikator Badan Pengelolaan Keuangan yaitu :

- a) Penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu
- b) Rasio belanja modal terhadap APBD
- c) BPK terhadap Laporan Keuangan

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Regresi linear sederhana digunakan untuk dapat melihat bagaimana analisis kinerja keuangan (X1) terhadap Pengelolaan keuangan (Y) dalam penelitian ini, model analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

Persamaan regresi :

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

x1 : Analisis kinerja keuangan

y :Pengelolaan keuangan

a :Konstanta

b : Koefisien regresi

Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat atau tidak, dapat dilakukan dengan:

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji parameter individual (Uji Statistik t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, dengan $\alpha = 0,05$ (Natawira, 2010). Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0.05 (α), maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0.05 (α), maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
Nilai yang lebih besar adalah variabel yang paling berpengaruh.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa

orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut ialah mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang periode 2014-2017 dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana.

Persamaan regresi :

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

x1 : Analisis kinerja keuangan

y : Pengelolaan keuangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BPKD

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999 di dukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pemerintah diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintah yang lebih responsive, transparan dan akuntabel juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah.

Salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang di bentuk berdasarkan peraturan daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang. Lembaga ini berudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya pengelolaan keuangan daerah lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategi dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal.

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekretaris Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan keputusan Bupati Enrekang.

2. Visi dan Misi BPKD

1. Visi :

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yg efektif, efisien, ekonomis, transparansi dan akuntabel untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman dan sejahtera.

2. Misi :

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Kepala BPKD : sebagai penentu kebijakan yang ada di perusahaan.
- b. Sekretaris : mengkoordinir dan menaungi kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Kepala bidang anggaran : mengawasi kepala sub bidang penyusunan APBD dan kepala sub bidang otorisasi anggaran.
- d. Kepala bidang bendahara : mengawasi kepala bidang belanja langsung dan kepala sub bidang belanja tidak langsung pembiayaan dan pengelolaan KASDA.
- e. Kepala bidang verifikasi : mengawasi kepala sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan dan kepala sub bidang verifikasi pertanggung jawaban.
- f. Kepala bidang akuntansi : mengawasi kepala sub bidang pembukuan, pelaporan dan kepala bidang neraca.

B. Data Khusus

1. Laporan LRA Tahun 2013-2017

Tabel 4.2

Laporan LRA Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah	23,765,694,464.00	37,641,158,766.00	55,857,486,754.00	63,863,375,385.00	136,152,091,582.00
2	Pendapatan Transfer	521,450,520,000.00	709,220,409,326.00	885,039,847,851.00	1.037.274.320.323,00	915,230,706,613.00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	18,175,462,000.00	385,448,000.00	5,750,716,000.00	2,849,022,542.00	6,336,630,000.00
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	484,467,905,495.00	575,556,524,720.00	662,869,772,628.00	707,040,121,137.00	707,508,330,458.00
2	Belanja Modal	130,684,218,179.00	144,844,630,150.00	323,990,191,974.00	402,667,852,324.00	239,221,872,318.00
3	Belanja Tak Terduga	1,250,000,000.00	1,900,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	250,000,000.00
4	Transfer	15,475,600,000.00	16,195,000,000.00	48,294,815,800.00	0,00	147,661,783,400.00
C	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan	8,835,052,496.00	26,161,663,066.00	100,038,475,771.00	114,316,060,862.00	49,322,557,981.00
D	PENGELUARAN					
1	Pengeluaran Pembiayaan	26,464,935,286.00	36,474,119,088.00	10,801,795,974.00	12,147,500,386.00	12,400,000,000.00

2. Laporan Neraca Tahun 2013-2017

Tabel 4.3

Laporan Neraca Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	AKTIVA					
1	Aktiva Lancar	30,628,253,684.22	80,335,810,647.08	86,134,984,700.98	17,828,109,573.55	20,538,182,950.70
2	Aktiva Tetap	1,382,153,583.22	1,546,158,017.25	1,657,198,315,958.99	1,555,015,973,869.61	1,522,557,810,859.70
3	Kas	26,214,640,339.27	74,312,625,716.08	77,014,263,468.54	7,083,554,920.99	6,341,500,997.54
B	KEWAJIBAN					
1	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	Kewajiban Jangka Pendek	27,044,773,127.33	16,190,630,969.33	40,900,284,255.33	32,110,903,376.33	47,822,646,838.67

Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan / kegiatan BPKD Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan adalah Rasio Likuiditas (rasio lancar dan rasio kas), Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Likuiditas

a. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan / instansi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{30,628,253,684}{27,044,773,127} \times 100\%$$

$$= 1.13\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{80,335,810,647}{16,190,630,969} \times 100\%$$

$$= 4.96 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{86,134,984,700}{40,900,284,255} \times 100\%$$

$$= 2.10 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{17.828.109.573}{32.110.903.376} \times 100\%$$

$$= 0.55 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{20,538,182,950}{47,822,646,838} \times 100\%$$

$$= 0.42 \%$$

Berdasarkan hasil Rasio Likuiditas diatas, pada tahun 2013 sebesar 1.13%, tahun 2014 sebesar 4.96%, tahun 2015 sebesar 2.10%, tahun 2016 sebesar 0.55% dan pada tahun 2017 sebesar 0.42%. Pada tahun 2014, mengalami kenaikan sebesar 3.83% yang disebabkan oleh Persediaan dan juga disebabkan karena Utang Jangka Pendek yang sudah terbayarkan meskipun tidak dibayar keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan karena disebabkan oleh Utang Jangka Pendek.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa, jika Aktiva Lancar meningkat, maka Kewajiban Jangka Pendek berkurang. Hal ini disebabkan karena Utang Jangka pendek akan dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan Aktiva Lancar.

b. Rasio Kas

Menurut Sugiono (2008), rasio kas adalah rasio yang merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan dibandingkan dengan total utang lancar.

Rumus yang digunakan :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{26,214,640,339}{27,044,773,127} \times 100\% \\ &= 0.96 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{74,312,625,716}{16,190,630,969} \times 100\% \\ &= 4.58 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{77,014,263,468}{40,900,284,255} \times 100\% \\ &= 1.88 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{7,083,554,920}{32,110,903,376} \times 100\% \\ &= 0.22 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{6,341,500,997}{47,822,646,838} \times 100\% \\ &= 0.13\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil Rasio Kas diatas, pada tahun 2013 sebesar 0.96%, tahun 2014 sebesar 4.58%, tahun 2015 sebesar 1.88%, tahun 2016 sebesar 0.22% dan pada tahun 2017 sebesar 0.13%. Jika dilihat dari tahun 2013-2014, Kas mengalami kenaikan sebesar 3.62% yang disebabkan oleh Kas di kas daerah dan Kas pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merialisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.4

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis Rasio Efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Tabel 4.5

Rasio Efektifitas BPKD Kabupaten Enrekang Periode 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2013	21,176,935,131.33	23,765,694,464.00	89.11%	Kurang Efektif
2014	34,997,091,444.63	37,641,158,766.00	92.98%	Cukup Efektif
2015	49,214,800,279.44	55,857,486,754.00	88.11%	Kurang Efektif
2016	56,383,446,988.95	63,863,375,385.00	88.29%	Kurang Efektif
2017	100,114,214,718.55	136,152,091,582.00	73.53%	Tidak Efektif
Jumlah rata-rata			86.40%	Kurang Efektif

Hasil dari rasio efektivitas Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2013, Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.23,765,694,464.00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp.21,176,935,131.33. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar

Rp.2,588,759,332.67, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 89.11% dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%.

Pada tahun 2014, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.37,641,158,766.00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp.34,997,091,444.63. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2,644,067,321.37. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 92.98%. Dapat dikategorikan Cukup Efektif karena dibawah 100%.

Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.55,857,486,754.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.49,214,800,279.44. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6,642,686,474.56. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 88.11%. Dapat dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%.

Pada tahun 2016, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.63,863,375,385.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.56,383,446,988.95. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7,479,928,396.05. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 88.29%. Dapat dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%.

Pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.136,152,091,582.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.100,114,214,718.55. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.36,037,876,863.45. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 73.53%. Dapat dikategorikan Tidak Efektif karena dibawah 100%.

3. Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Kriteria Efisiensi Kinerja keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
Di bawah 60	Sangat Efisien

Berdasarkan analisis Rasio Efisiensi yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel 4.7

Rasio Efisiensi BPKD Kabupaten Enrekang Periode 2013-2017

Tahun	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2013	1. Belanja Operasional	484,467,905,495.00	468,987,945,106.00	96.80%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	130,684,218,179.00	103,502,560,153.00	79.20%	Efisien
2014	1. Belanja Operasional	575,556,524,720.00	525,145,267,452.00	91.24%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	144,844,630,150.00	114,219,392,457.00	78.86%	Efisien
2015	1. Belanja Operasional	662,849,722,628.00	597,057,086,707.00	90.07%	Cukup Efisien
	2. Belanja Modal	323,990,191,974.00	257,924,165,935.00	79.61%	Efisien
2016	1. Belanja Operasional	707.040.121.137,00	665.508.874.587,00	94,13%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	402.667.852.324,00	329.905.317.517,00	81,93%	Cukup Efisien
2017	1. Belanja Operasional	707,508,330,458.00	668,481,331,439.00	94.48%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	239,221,872,318.00	200,088,477,045.00	83.64%	Cukup Efisien
Jumlah rata-rata				86.74%	Cukup Efisien

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.484,467,905,495.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.468,987,945,106.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.15,479,960,389.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 96.80% dikategorikan Kurang Efisien karena melebihi 90%. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.130,684,218,179.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.103,502,560,153.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.27,181,658,026.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 79.20% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Pada tahun 2014, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.575,556,524,720.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.525,145,267,452.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.50,411,257,268.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91.24% dikategorikan Kurang Efisien karena melebihi 90%. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.144,844,630,150.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.114,219,392,457.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.30,625,237,693.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 78.86% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Pada Tahun 2015, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.662,849,722,628.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar

Rp.597,057,086,707.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.65,792,635,921.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 90.07% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.323,990,191,974.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.257,924,165,935.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.66,066,026,039.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 79.61% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Pada Tahun 2016, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.707.040.121.137,00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.665.508.874.587,00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.41,531,246,550.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 94,13% dikategorikan Kurang Efisien. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.402.667.852.324,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.329.905.317.517,00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.72,762,534,807.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 81,93% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Pada Tahun 2017, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.707,508,330,458.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.668,481,331,439.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.39,026,999,019.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi

sebesar 94.48% dikategorikan Kurang Efisien. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.239,221,872,318.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.200,088,477,045.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.39,133,395,273.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 83.64% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama bahwa Rasio Likuiditas (rasio lancar dan rasio kas), Rasio Efektif dan Rasio Efisiensi dapat menggambarkan kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun periode 2013-2017 berdasarkan hasil diatas. Sedangkan rumusan masalah yang kedua bahwa gambaran kinerja keuangan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan BPKD kepada masyarakat atau instansi lainnya di Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil diatas. Walaupun jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun yang akan datang, kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang meningkat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

C. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan terhadap pengelolah keuangan. Adapun hasil dari penelitian ini dilihat dari tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.935	4.138	
	Kinerja_keuangan	.712	.124	.847

a. Dependent Variable: Pengelolah_keuangan

Sumber : hasil output SPSS 22, 2018

Tabel diatas dengan memperhatikan angka yang berada pada kolom *Unstandardized Coefficients* *Beta*, dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 1.935 + 0.712 X$$

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 22, diperoleh hasil yang berarti bahwa nilai konstanta sebesar 1.935, jika nilai X dianggap 0 maka nilai dari pengelolah keuangan adalah sebesar 1.935 dan b artinya variabel kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolah keuangan dan apabila kinerja keuangan meningkat satu-satuan, maka pengelolah keuangan akan meningkat sebesar 0.712 satuan dengan asumsi X konstan.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Apabila t-hitung > t-tabel maka dapat dikatakan signifikan, yaitu terdapat pengaruh antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikatnya. Adapun hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.935	4.138		468	.648
	Kinerja_keuangan	.712	.124	.847	5.745	.000

a. Dependent Variable: Pengelolah_keuangan

Sumber : hasil output SPSS 22, 2018

Analisis uji-t pada tabel 4.12 diatas, untuk variabel kinerja keuangan nilai t_{hitung} sebesar 5.745 dan nilai sig .000 berarti kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolah keuangan Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data diatas, variabel kinerja keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolah keuangan, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama bahwa Rasio Likuiditas (rasio lancar dan rasio kas) dapat menggambarkan kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang Tahun periode 2013-2017 berdasarkan hasil diatas. Sedangkan rumusan masalah yang kedua bahwa gambaran kinerja keuangan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan BPKD kepada masyarakat atau instansi lainnya di Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil diatas. Walaupun jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun yang akan datang, kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang meningkat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *SPSS* versi 22, diperoleh hasil yang berarti bahwa nilai konstanta sebesar 1.935, jika nilai *X* dianggap 0 maka nilai dari pengelola keuangan adalah sebesar 1.935 dan *b* artinya variabel kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan dan apabila kinerja keuangan meningkat satu-satuan, maka pengelola keuangan akan meningkat sebesar 0.712 satuan dengan asumsi *X* konstan.

$$Y = 1.935 + 0.712 X$$

Pengujian hipotesis yang diajukan yaitu diduga bahwa terdapat pengaruh secara signifikan kinerja keuangan terhadap pengelola keuangan dapat diterima. Diketahui dari hasil uji *t* diperoleh keterangan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelola keuangan (tabel 4.9).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah di bahas serta perhitungan-perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari rasio efektivitas Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2013, Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.23,765,694,464.00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp.21,176,935,131.33. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.2,588,759,332.67, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 89.11% dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%. Pada tahun 2014, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.37,641,158,766.00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp.34,997,091,444.63. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2,644,067,321.37. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 92.98%. Dapat dikategorikan Cukup Efektif karena dibawah 100%. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.55,857,486,754.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.49,214,800,279.44. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6,642,686,474.56. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 88.11%. Dapat dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%. Pada tahun 2016, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.63,863,375,385.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.56,383,446,988.95. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7,479,928,396.05. Dengan demikian diperoleh

rasio efektivitas sebesar 88.29%.Dapat dikategorikan Kurang Efektif karena dibawah 100%.Pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.136,152,091,582.00 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.100,114,214,718.55. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.36,037,876,863.45. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 73.53%.Dapat dikategorikan Tidak Efektif karena dibawah 100%.

2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.484,467,905,495.00dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.468,987,945,106.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.15,479,960,389.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 96.80% dikategorikan Kurang Efisien karena melebihi 90%. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.130,684,218,179.00dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.103,502,560,153.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.27,181,658,026.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 79.20% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Pada tahun 2014, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.575,556,524,720.00dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.525,145,267,452.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.50,411,257,268.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91.24% dikategorikan Kurang Efisien karena melebihi 90%. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.144,844,630,150.00dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.114,219,392,457.00. Selisih anggaran

belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.30,625,237,693.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 78.86% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Pada Tahun 2015, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.662,849,722,628.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.597,057,086,707.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.65,792,635,921.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 90.07% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.323,990,191,974.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.257,924,165,935.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.66,066,026,039.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 79.61% dikategorikan Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Pada Tahun 2016, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.707.040.121.137,00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.665.508.874.587,00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.41,531,246,550.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 94,13% dikategorikan Kurang Efisien. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.402.667.852.324,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.329.905.317.517,00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.72,762,534,807.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 81,93% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

Pada Tahun 2017, Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.707,508,330,458.00 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.668,481,331,439.00. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.39,026,999,019.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 94.48% dikategorikan Kurang Efisien. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.239,221,872,318.00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.200,088,477,045.00. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.39,133,395,273.00, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 83.64% dikategorikan Cukup Efisien. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya.

B. Saran

1. Bagi Instansi

Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang diharapkan meninjau dan melakukan evaluasi proses penyusunan anggaran setiap periodenya dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat, lebih memperhatikan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu dan juga harus mengukur efektivitas dan efisiensi BPKD agar apa yang diinginkan bisa tercapai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Brealey, Myers & Marcus. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, jilid 1. Jakarta : Erlangga
- Brief. 2012. Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal
- Fahmi, Irham. 2012. *"Analisis Kinerja Keuangan"*, Bandung : Alfabeta
- Govindaraja, Nugraha. (2010). *Pengukuran kinerja keuangan*.
- Harahap. (2010). *Analisis Rasio keuangan*. Jakarta.
- Kasmir (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kasmir .(2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Muhammad Yogi Perwira. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-2013*. Jurnal kinerja keuangan.
- Munawir. (2008). *Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta.

Nanda Ertina Gabriella Mailoor¹, Paul David Elia Saerang², Harijanto Sabijono³.

(2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tahun 2011-2014*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Nur Habibah. (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013*. Jurnal keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Rudianto.(2013). *Kinerja Keuangan*.Bandung : Alfabeta

Samryn.(2011). *Analisis Rasio Keuangan*.

Sugiyono.(2008),*Panduan Praktis Dasar Analisis Laporan Keuangan*.Grasindo.Jakarta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.

Suratman, E., & Halim,A. (2012),” Redefinisi Kumulatif Defisit APBD,”dalamPolicy

Susetyo .(2010). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*.Bandung : Refika Aditama.

Van Horne. (2009). *Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan*.Edisi kedua belas buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Warsidi, Bambang & Fahmi.(2011). *Analisis Rasio Keuangan*.

L
A
M
P
I
R
A
N

Hasil Pengujian Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.935	4.138	
	Kinerja_keuangan	.712	.124	.847

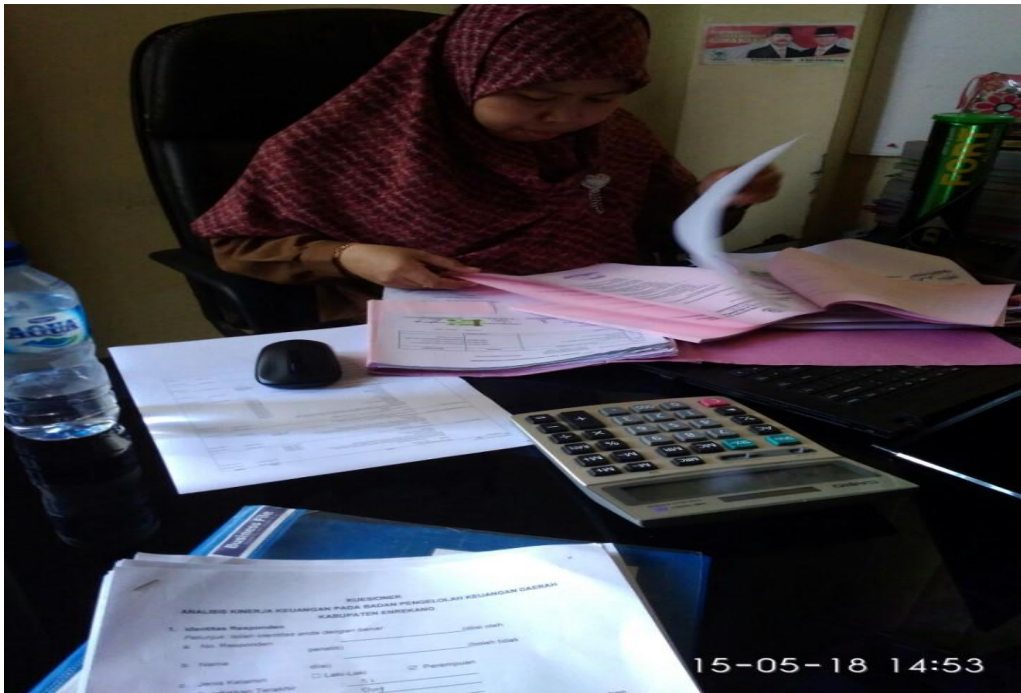
a. Dependent Variable: Pengelolah_keuangan

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.935	4.138		.468	.648
	Kinerja_keuangan	.712	.124	.847	5.745	.000

a. Dependent Variable: Pengelolah_keuangan







BIOGRAFI PENULIS



Ayu Andira dipanggil Ayu lahir di Riso pada tanggal 30 Agustus 1996 dari pasangan suami istri Bapak Baharuddin S.Pd dan Ibu Budhiati. Peneliti adalah anak ke tiga dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan Kejayaan Utara Raya Blok L No.449 Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 71 Riso lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Enrekang lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Enrekang lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Manajemen kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.